

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Turki adalah sebuah negara yang terletak di daerah perbatasan Eropa dan Asia. Turki menjadi satu-satunya negara yang berada dalam kawasan Eurasia sehingga Turki menjadi negara tujuan bagi negara-negara Eropa dan Asia sebagai jalur perdagangan utama mereka. Negara yang saat ini dipimpin oleh Erdogan ini bertetangga dengan Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di sebelah timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di sebelah tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Turki sebesar 77 juta jiwa dengan mayoritas agama Islam sebesar 73%, disusul oleh Kristen sebesar 2%, dan agama lainnya sebesar 8%. Di Turki juga terdapat penduduk yang tidak beragama sebesar 7%. Ibu kota Turki adalah Ankara, akan tetapi, kota terbesarnya adalah Istanbul. Hal ini dikarenakan kondisi Istanbul yang sangat strategis, yaitu menjadi tempat persilangan antara benua Asia dan Eropa.

Turki adalah negara republik konstitusional yang sekuler. Secara kebudayaan, Turki memiliki budaya hasil campuran dari budaya timur dan barat dan sering disebut sebagai jembatan antar dua peradaban. Salah satu bentuk keistimewaan Turki adalah negara ini sedikit demi sedikit bergabung ke dalam dunia barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur. Turki juga merupakan salah satu negara pendiri dari PBB, OKI, dan lain sebagainya. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah menjadi anggota koalisi sejak tahun 1963.

Pada dasarnya kecenderungan kebijakan luar negeri tergantung negara tersebut dipimpin oleh siapa. Dengan kata lain, Turki sendiri mempunyai sejarah dan prinsip kebijakan luar negeri yang cukup panjang. Pada awalnya, Turki dikenal sebagai negara yang sangat mengedepankan asas keislaman dalam mengambil sebuah kebijakan. Pada awal terbentuknya Turki pada masa Turki Utsmani kebijakan pemerintah Turki sangat mengutamakan asas dan nilai-nilai keislaman. Sehingga mayoritas kebijakan pemerintah Turki sangat menguntungkan penduduk muslim sekalipun penduduk Turki tidak hanya muslim. Namun, sejak Musthafa Kemal Ataturk menjabat sebagai Presiden Turki, Turki menjadi sebuah negara sekuler. Sekulerisme sendiri merupakan sebuah paham atau ideologi yang memisahkan antara nilai-nilai keagamaan dengan politik (Rahman, 2018).

Pemecahan antara nilai keagamaan dengan aktifitas politik sebuah negara diyakini dapat menjadi daya tarik bagi negara-negara non-muslim untuk bekerjasama dengan Turki. Turki berupaya membuat sebuah kebijakan luar negeri yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok agama saja melainkan juga menerapkan kebijakan luar negeri yang juga menguntungkan berbagai kelompok agama. Perbedaan keyakinan atau ideologi antar negara dinilai oleh pemerintah Turki pada zaman Ataturk sebagai hambatan untuk menjalin kerjasama. Sebagai contoh, dalam ajaran Islam terdapat sebuah hukum yang membatasi sebuah negara Islam untuk melakukan kerjasama dengan negara non-Islam. Prinsip ini dinilai tidak fleksibel dan justru menghambat perkembangan sebuah negara. Dengan demikian, paham sekulerisme lahir sebagai alternatif dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memisahkan agama dengan aktifitas politik sebuah negara (Isputaminingsih, 2014).

Masa pemerintahan Presiden Musthafa Kemal Ataturk dengan paham sekulernya telah berganti sejak Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014 hingga saat ini. Pada Pemerintahan Erdogan, nilai-nilai keislaman kembali diutamakan dalam mengambil sebuah keputusan. Era keislaman kembali berjaya pada

masa pemerintahan Presiden Erdogan. Presiden Erdogan juga berhasil mengambil hati rakyat Turki karena asas dan nilai Islam yang diutamakan dalam setiap kebijakannya. Salah satu bentuk kebijakannya adalah mengizinkan pemakaian hijab di setiap sektor bidang pekerjaan yang sebelumnya dilarang. Pelarangan minuman keras juga menjadi tolak ukur hukum yang berasaskan nilai Islam yang kemudian menjadi alasan rakyat Turki untuk memilih Erdogan sebagai Presiden Turki tahun 2014 (Junaidi, 2016).

Selanjutnya, adapun dalam sektor ekonomi, Presiden Erdogan berhasil meningkatkan pendapatan dalam negeri Turki. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Presiden Erdogan memanfaatkan jalur Turki sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Letak strategis ini dimanfaatkan sebagai motor penggerak ekonomi utama Turki selain dari sektor lainnya. Bahkan dari sisi perkembangan sektor ekonomi Turki pada saat Erdogan masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki sebelum terpilihnya menjadi seorang presiden pada tahun 2014, Turki berhasil melunasi seluruh utang negaranya ke Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2013. Pasca melunasi hutang negaranya ke IMF pada tahun 2013, keadaan Ekonomi negara Turki semakin membaik. Dan pada masa kepemimpinan Erdogan, negara Turki menjadi negara yang tingkat perekonomiannya menduduki peringkat ke-16 di seluruh dunia dan menduduki peringkat ke-6 di Eropa. Selain itu, setelah negara Turki melunasi hutang negara yang di bayarkan ke IMF, Turki resmi menjadi negara bebas hutang setelah 19 Tahun kebelakang (Christiastuti, 2018).

Akan tetapi, pada tahun 2018, Turki mengalami krisis ekonomi dimana mata uang lira jatuh terhadap Dollar Amerika Serikat hingga lebih dari 20% serta angka inflasi yang semakin meningkat (Suryarandhika, 2020). Krisis ekonomi Turki disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah besarnya hutang luar negeri Turki. Pemerintah Turki dibawah kepemimpinan Erdogan mengalami peningkatan hutang luar negeri sebesar 18% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Turki. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi

dengan peningkatan kemampuan Turki dalam menghasilkan devisa negara melalui kegiatan ekspor impor barang dan jasa. Ditambah lagi, cadangan devisa negara yang sedikit membuat Turki mengalami defisit keuangan sehingga menyebabkan Turki semakin sulit untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Meski demikian, Presiden Erdogan tetap memberlakukan suku bunga yang rendah dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang akan mendongkrak nilai tukar Lira. Akan tetapi, kebijakan Erdogan tersebut justru membuat mata uang Lira semakin terpuruk yang justru membuat banyak investor menarik asetnya untuk dipindahkan ke negara lain yang lebih menjamin (Damhuri, 2020).

Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi Turki adalah hubungan luar negeri Turki dan AS yang kurang harmonis. Hal ini bermula dari kejadian penangkapan seorang pendeta berkewarganegaraan Amerika Serikat oleh pemerintah Turki karena dituduh sebagai mata-mata, hingga berakhir pada pemberlakuan kenaikan tarif impor terhadap produk baja Turki sebesar 50% dan aluminium sebesar 20% (Dayana, 2019). Faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi Turki tahun 2018 memaksa Turki untuk merombak kembali kebijakan luar negerinya terutama dalam sektor ekonomi.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas bahwa Turki pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat perekonomian negaranya memiliki beberapa permasalahan baik dari Eksternal seperti hubungan antar negara yang kurang harmonis maupun Internal yakni naiknya modal usaha dan menurunnya minat pasar. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik rumusan masalah **Bagaimana Strategi Politik Luar Negeri Turki Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2018?**

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep **Kebijakan Luar Negeri**. Konsep Kebijakan Luar Negeri itu sendiri memiliki arti secara garis besar adalah melakukan bentuk keputusan berkerja sama antar negara dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial, dan Militer demi bentuk kepentingan negara, keamanan negara, ideologi negara, serta kemakmuran masing-masing negara.

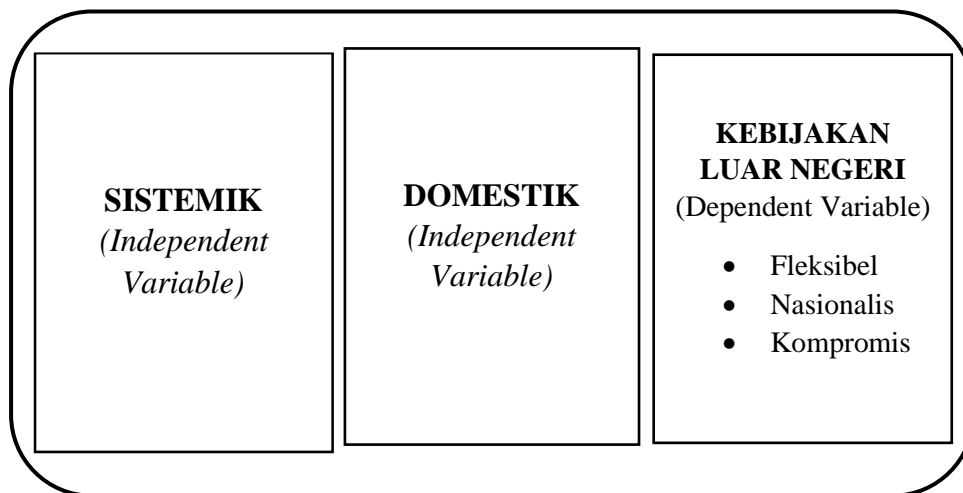
Menurut Jeffrey W. Taliaferro Kebijakan Luar Negeri merupakan kesatuan perangkat yang dibuat oleh pemerintah sebuah negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Disebut sebagai kesatuan perangkat kebijakan karena kebijakan luar negeri tidak hanya disusun oleh satu lembaga negara saja melainkan oleh seluruh lembaga negara, aktor masyarakat dan seluruh elemen politik yang termasuk di dalam kebijakan tersebut. Adapun tujuan mengapa kebijakan luar negeri dibentuk dengan pertimbangan oleh seluruh elemen masyarakat disebabkan agar tercapainya kepentingan nasional dan membawa keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat sebuah negara .

Kebijakan luar negeri juga disebut sebagai kebijakan lintas negara sebab merupakan reaksi ataupun respon terhadap kejadian internasional yang berdampak pada sebuah negara. fakta-fakta internasional atau isu yang bersinggungan pada sebuah negara memaksa pemerintah sebuah negara tersebut untuk mengambil tindakan dengan cepat guna melindungi kepentingan dan kedaulatan negaranya. Kedaulatan sebuah negara merupakan kehormatan dan harga diri yang harus dijaga bagi sebuah negara oleh sebab itu kebijakan luar negeri dibuat dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan harga diri sebuah negara.

Sebagaimana yang diurai diatas bahwa kebijakan luar negeri dibentuk berdasarkan fenomena internasional maka kebijakan luar negeri dibuat karena adanya faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang dimaksud adalah keadaan politik global yang dapat mempengaruhi stabilitas politik atau ekonomi pada sebuah negara. Tidak hanya itu, kebijakan luar negeri juga dapat didorong oleh faktor internal seperti kepentingan partai, elit politik, media, opini public dan lain sebagainya. Kelompok kepentingan juga berpengaruh bagi sebuah negara dalam mengambil kebijakan luar negeri (Maksum, 2015).

Terdapat skema kerangka dalam memahami uraian diatas yaitu bagaimana memahami proses pengambilan kebijakan luar negeri menurut Jeffrey W. Taliaffero adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Kerangka Analisis Perumusan Kebijakan Luar Negeri**



Pada table diatas dapat dilihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan *dependent variable* yang berarti objek yang dikenai pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal/sistemik dan domestic merupakan *independent variable* yang berarti faktor yang mengenai pekerjaan. Artinya adalah faktor sistemik dan domestic mempengaruhi dibentuknya kebijakan luar negeri pada sebuah negara. Sebagaimana juga yang diurai diatas bahwa komponen variable sistemik mencakup fenomena internasional dan variable domestic yang merupakan dorongan aktor

kepentingan dalam negeri yang juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri.

Pada table diatas juga disebutkan bahwa kebijakan luar negeri mempunyai tiga sifat. Pertama yaitu fleksibel yang berarti kebijakan diputuskan berdasarkan situasi politik domestic maupun global. Kedua, nasionalis yang berarti kebijakan luar negeri diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip negara dan menjunjung tinggi cita-cita sebuah negara. Ketiga, kompromis yang berarti kebijakan luar negeri yang bersifat terbuka dan memberi peluang untuk bekerjasama dengan aktor atau negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Adapun implementasi yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka berpikir diatas. Dalam kasus Turki, kejadian melemahnya mata uang Lira menyebabkan berbagai macam kerugian yang dialami oleh Turki khususnya dalam kebijakan Amerika Serikat terhadap kegiatan impor Turki. Pemerintah Turki pun dituntut untuk segera mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang mereka alami. Fakta jatuhnya nilai mata uang lira merupakan situasi genting yang mempengaruhi sektor ekonomi Turki. Keputusan Amerika Serikat menaikkan biaya impor merupakan faktor eksternal yang memaksa Turki untuk mengubah haluan kebijakan luar negerinya agar dapat bertahan.

Kemudian, dorongan internal juga datang dari masyarakat Turki. Beberapa masyarakat Turki sebagai pelaku usaha makanan mengungkapkan sejak terjadinya krisis ekonomi Turki, harga sewa tempat dan modal yang mereka butuhkan naik secara drastis. Oleh sebab itu, harga produk juga dinaikkan, namun pembeli semakin menurun. Tidak stabilnya harga pasar menyebabkan pengusaha kecil mengalami kerugian besar bahkan menutup tokonya. tutupnya beberapa toko lokal berdampak pada perputaran uang yang tidak bergerak dan masyarakat cenderung menyimpan uang mereka sehingga negara dapat mengalami resesi.

Faktor internal tersebut menjadi variable yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dahulu dan secara tidak langsung memaksa pemerintah Turki dalam masa kepemimpinan Erdogan untuk mengubah haluan kebijakan luar negerinya. Salah satunya yaitu dengan mendatangkan investor dari China. Sebelumnya, Turki mempunyai banyak afiliasi atau bekerjasama dengan negara kawasan Amerika dan Eropa. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, memaksa Turki untuk mengubah haluannya untuk bekerjasama dengan China agar dapat keluar dari krisis ekonomi tersebut.

Keputusan Turki untuk bekerjasama dengan China merupakan sejarah yang terbilang unik sebab pada tahun 2016 China dengan Turki mempunyai perselisihan politik mengenai isu Muslim Uighur. Namun, pada tahun 2017, Turki beralih untuk bekerjasama dengan China agar pemerintahan dan negara dapat bertahan serta mengatasi krisis ekonomi di tahun 2018.

Faktor Internal lainnya yang kian mendesak pemerintah Turki untuk segera mengatasi Krisis Ekonomi di negara yakni warga negaranya sendiri. Nilai mata uang Lira yang semakin jatuh membuat kelompok bisnis terbesar di Turki yakni TUSIAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) mendesak Erdogan untuk meninggalkan strategi lamanya yaitu menerapkan suku bunga yang rendah di Turki dan Kembali ke Aturan Ilmu Ekonomi. Secara tidak langsung penerapan suku bunga rendah akan menyebabkan semakin turunnya nilai mata uang Lira. Tidak hanya kelompok Pembisnis saja yang melakukan pendesakkan terhadap pemerintah Turki, namun efek dari Krisis Ekonomi tersebut berdampak kepada kegiatan Politik di Turki. Partai oposisi ingin menyegerakan pemilihan Presiden Kembali di karenakan semenjak Presiden Erdogan memimpin, tidak aja kesjahteraan bagi warga negara Turki. Harga bahan makanan dan bahan baku tekstil yang semakin tinggi, tidak sebanding dengan pendapatan warga negara nya (Said, 2021)



## 2. Teori Kerjasama Internasional Sektor Ekonomi

Dalam pengertian Kerjasama Internasional secara garis besar memiliki pengertian yang sama dengan pengertian Kebijakan Luar Negeri. Namun Kerjasama Internasional lebih dapat di fokuskan kepada satu hal. Dalam penulisan ini, bentuk Kerjasama Internasional lebih di fokuskan terhadap bidang Ekonominya, yang dimana bentuk Kerjasama dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menjawab rumusan masalah di atas, maka di tambahkannya teori Kerjasama Internasional guna mempermudah dalam mengkaji dan menjawab permasalahan di atas. Dan sudah dapat dipastikan mengapa penulis ingin menggunakan Teori Kerjasama Internasional di karenakan semua negara tidak dapat berdiri sendiri (*Independent*) melainkan bergantung dengan negara lain dalam memajukan negaranya sendiri.

Menurut K.J Holsti mengenai Kerjasama Internasional dapat di artikan sebagai berikut (Holsti, 1988):

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

Setiap negara pasti akan memiliki suatu masalah di dalam, terdapat factor Internal maupun Eksternal yang mempengaruhi. Turki merupakan negara yang mendapatkan permasalahan di Negeranya, dan solusi dari pemerintah Turki itu sendiri yaitu melakukan bentuk Kerjasama Internasional dengan negara China. Bentuk Kerjasama Internasional tidak hanya antara satu negara dan negara lainnya yang di sebut Kerjasama Bilateral. Akan tetapi Kerjasama

Internasional memiliki tiga bentuk dan masing-masing bentuk tersebut memiliki tujuan. Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk Kerjasama Internasional (Gamedia, 2021):

a. Kerjasama Bilateral

Yakni bentuk Kerjasama Internasional yang dimana negara yang terlibat hanya dua negara yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun bentuk Kerjasama Bilateral ini memiliki tujuan sederhana yaitu menjalin hubungan yang sebelumnya sudah terjalin dan mengharmoniskan Kembali hubungan kedua negara atau bahkan negara yang belum sama sekali melakukan Kerjasama ingin menjalin hubungan dengan negara lainnya. Dengan kata lain, bentuk Kerjasama ini memiliki tujuan yang lebih spesifik dari kedua Negara yang terlibat.

b. Kerjasama Multilateral

Kebalikkan dari bentuk Kerjasama Bilateral, bentuk Kerjasama Internasional secara Multilateral memiliki bentuk Kerjasama antar negara yang melibatkan banyak negara serta tidak di batasi oleh Batasan negara apapun. Dalam Kerjasama Multilateral ini di dalamnya terdapat anggota yakni di isi dengan negara-negara yang memiliki kekuatan tersendiri di dalamnya. Terdapat anggota utama dan anggota aktif, dua tipe anggota tersebut memiliki karakter dan kekuatan masing-masing. Anggota utama berisi negara yang memiliki kekuatan yang dapat di artikan sebagai anggota yang berada di posisi atas. Sedangkan anggota aktif berisi negara yang memiliki kekuatan yang terbatas daripada anggota utama,

c. Kerjasama Regional

Kerjasama Regional merupakan Kerjasama yang di lakukan oleh negara untuk daerah atau Kawasan tertentu. Yang memiliki tujuan menyejahterakan daerah atau Kawasan tertentu di negaranya. Contoh bentuk Kerjasama Internasional secara Regional yakni antar organisasi dunia dengan negara yang membutuhkan support dalam bentuk tertentu.

Dengan kata lain, Turki akan menggunakan konsep Teori Kerjasama Internasional sector Ekonomi demi menyelesaikan permasalahan negara di tahun 2018 yakni krisis Ekonomi yang di sebabkan oleh jatuh nya nilai mata uang Lira. Adapun bentuk Kerjasama yang macam-macam, dan bentuk keuntungann yang di terima oleh masing-masing negara pun berbeda. Dengan kata lain, Turki masih membutuhkan bantuan negara lain dalam menangani permasalahan yang sedang di hadapinya. Bentuk Kerjasama Bilateral antara Turki dan China adalah sala satu contoh Turki masih membutuhkan negara lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Ekonominya. Macam-macam bentuk Kerjasama Internasional memiliki manfaat nya masing-masing. Dalam kata lain, Kerjasama Internasional Turki memiliki manfaat yang pasti akan sangat menguntungkan dari sisi perekonomian Turki. Adapun bentuk Kerjasama Internasional dari Sektor Ekonomi nya sebagai berikut (M.Pd, 2012):

1. Perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan Kerjasama Internasional yang hampir semua negara melakukan nya. Contoh bentuk Kerjasama Internasional Sektor Ekonomi dalam bentuk Perdagangan yakni aktivitas Ekspor dan Impor dari negara ke negara lainnya.
2. Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah salah satu bentuk Kerjasama Internasional yang termasuk dalam kriteria menegah keatas. Bentuk Kerjasama Internasional Sektor Ekonomi dalam bentuk Penanaman Modal adalah salah satu opsi dari suatu negara untuk membantu negara yang sedang mengalami permaslaahan Krisis Ekonomi dengan bentuk mendirikan suatu Kawasan Industri di negara yang sedang mengalami Krisis sehingga membantu perputaran roda perekonomian sekitar.

3. Investasi Portofolio. Merupakan bentuk Kerjasama Internasional Sektor Ekonomi yang dimana memiliki kriteria menengah keatas dan dapat di katakan mendekati bentuk Kerjasama Penanaman Modal. Hal ini di buktikan dengan metode Kerjasama yang langsung seperti membeli saham perusahaan negara, obligasi, memberi pinjaman terhadap perusahaan swasta serta perusahaan pemerintah dan mendeposito kan dana berjangka.

#### D. Argumentasi

#### **Strategi Politik Luar Negeri Turki Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2018**

##### **adalah:**

1. Pemerintah Turki melakukan mediasi terhadap actor-aktor dalam negeri yang berpengaruh untuk menentukan bentuk Kerjasama antar negara guna menunjang perekonomian Turki.
2. Pemerintah Turki pada masa Presiden Erdogan memilih untuk berkerjasama secara Bilateral dengan negara lain yakni China untuk menaikkan perekonomian Turki Perdagangan, Penanaman Modal.

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara signifikan mengenai bentuk permasalahan yang terjadi di negara Turki pada tahun 2018 khususnya pada sector Ekonomi Negara, baik dari Faktor Eksternal maupun Internal.
- b. Mengetahui bentuk perombakan Kebijakan Luar Negeri pemerintah Turki dalam masa awal kepemimpinan Presiden Recep Tayyib Erdogan khususnya dalam sector Ekonomi di tahun 2018, serta mengetahui bentuk Kerjasama Turki dan negara lain.

#### F. Metode Penulisan

Skripsi yang ditulis ini memiliki sifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi pustaka sebagai sumber utama penulisan. Data yang akan digunakan merupakan data-data kualitatif yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan desk study dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang telah ada sebelumnya, membaca dan menganalisa dokumen dan kumpulan datanya sekunder seperti buku, jurnal, artikel majalah, maupun website. Analisis dari data yang telah diperoleh kemudian akan dilanjutkan dengan deduksi menggunakan teori/konsep yang telah dibahas di dalam landasan konseptual guna menjawab pertanyaan penelitian dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya.

#### G. Jangkauan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki batasan penelitian pada tahun 2014-2018. Yang dimana pada tahun 2014 merupakan tahun pertama Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki pada tanggal 10 Agustus 2014. Dan pada tahun 2018 terdapat permasalahan negara Turki yakni Krisis Ekonomi. Pemerintah Turki di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan melaksanakan perombakan signifikan dalam bentuk kebijakan luar negeri negaranya tersebut.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab yaitu :

**BAB I** merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah landasan konseptual, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan rancangan sistematika penulisan.

**BAB II** merupakan pembahasan mengenai permasalahan yang akan diangkat yakni Krisis Ekonomi Turki pada tahun 2018 secara signifikan baik dari permasalahan Internal maupun Eksternal.

**BAB III** berisi tentang bentuk Langkah-langkah pemerintah Turki serta bentuk keputusan pemerintah Turki pada masa kepemimpinan Erdogan terhadap Kebijakan Luar Negeri dalam melakukan Kerjasama dengan negara China.

**BAB IV** merupakan bagian akhir, yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan atas penelitian yang dilakukan penulis dalam mengangkat permasalahan Krisis Ekonomi Di Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyib Erdogan pada tahun 2018.